

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESIR SELATAN
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, dimana dalam satu tahun tersebut telah direncanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun rencana kerja mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun penyusunan Rencana Kerja SKPD terdapat pada Bab II pasal 2.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup mengacu kepada Musrenbang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diselenggarakan oleh Bapedalitbang dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan isu lingkungan hidup. Keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan sangat erat, hal ini dapat dilihat bahwa Renja Dinas Lingkungan Hidup harus sesuai dengan dokumen RPJM dan RPJP Kabupaten Pesisir Selatan. Tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD, setelah ada renja kemudian disesuaikan dengan anggaran APBD yang telah di Plot oleh Bapedalitbang untuk masing-masing SKPD.

Rencana Kerja SKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Kerja dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Rencana Kerja SKPD mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Rencana Kerja SKPD dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing OPD, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Renja SKPD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 perlu dilaksanakan karena Rencana Kerja tersebut merupakan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Penyusunan Renja mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016 - 2021 dan melihat kepada isu-isu strategis yang berkembang, maka ditetapkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu ;

1. Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat ;
2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan ;
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pesisir Selatan ;
4. Peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing ;
5. Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata ;
6. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis ;
7. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan ;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengurangan ;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima ; dan
10. Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang.

Kesepuluh Prioritas Pembangunan Daerah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya, yang dalam tahunan dirinci dalam Rencana Kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup, maka dibentuklah SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan perubahan SKPD ini maka perubahan visi, misi dan rencana kerja akan terjadi secara signifikan, diharapkan akan sesuai dengan RPJMD 2016-2021 dengan patokan APBD Tahun Anggaran 2019.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagai dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup memuat prioritas pembangunan, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif Dinas Lingkungan Hidup, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program prioritas berorientasi kepada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja merupakan pedoman penyusunan APBD, dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik ;
2. Pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun ; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.

Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada RKP Nasional dan

RKPD Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dilengkapi dengan Lampiran yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu dana untuk masing-masing program.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 disusun dalam 4 (empat) Bab yang terdiri dari :

- BAB I** : Merupakan BAB pendahuluan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Berisikan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu yang membahas evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup, analisa kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III** : Berisi mengenai Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang membahas mengenai telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Daerah, serta program dan kegiatan
- BAB IV** : Berisi mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan
- BAB V** : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra

Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tahun 2018 yang diusulkan pada tahun 2017 sebesar **Rp.5.952.500.000,-** (Lima milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan pembahasan dengan Tim Anggaran maka ditetapkan plafon dana untuk Dinas Lingkungan Hidup sebesar **Rp.2.860.563.204,-** . Evaluasi terhadap Rencana Kerja yang diusulkan adalah **48,06 %** yang menjadi ketetapan APBD.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk memperkirakan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 maka perlu memperhatikan dan menelaah kembali Indikator kinerja tahun 2017 sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2017 sekaligus mengkaji hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu kepada APBD tahun Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengevaluasi hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Kegiatan merupakan tindakan kongkrit yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan mengacu kepada kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Program yang dilaksanakan pada Tahun 2017 oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 8 program dan tersebar dalam 36 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Permasalahan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan secara perlahan dan cenderung akan menjadi salah satu persoalan rumit di masa yang akan datang oleh pemerintah daerah sebagai pengelola, khususnya dalam menyediakan sarana dan

prasarana pengelolaan sampah secara fisik dan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Perkembangan aktifitas perekonomian di setiap kecamatan, khususnya di lokasi pasar-pasar ibukota kecamatan dan nagari (pakan/balai) merupakan aspek lain dari permasalahan sampah di masa mendatang yang perlu pemikiran ke arah yang lebih baik. Permasalahan pengelolaan sampah ini pada dasarnya berakar pada tidak seimbangnya kemampuan pelayanan (kelembagaan, finansial, personil, regulasi dan teknis sarana dan prasarana) dengan beban pengelolaan yang harus ditanggung oleh pihak pengelola kebersihan. Rendahnya kinerja pengelolaan sampah secara perlahan akan berdampak langsung terhadap degradasi kualitas lingkungan dan sanitasi masyarakat. Penumpukan dan pembuangan sampah yang tidak sesuai, seperti pembuangan ke saluran, sungai, tanah kosong, serta tempat lainnya akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, kenyamanan dan estetika.

Tujuan penyusunan periodik volume sampah adalah untuk mengetahui jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, sekolah, perkantoran dan pasar yang diambil secara sampel pada tiap kecamatan. Timbulan sampah tahun 2016 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 0,30 kg/orang/hari.

Rekomendasi hasil perhitungan :

- Peningkatan kinerja persampahan baik kualitas dan kuantitas yaitu : peningkatan sarana dan prasarana persampahan seperti tong sampah, tempat pembuangan sampah sementara dan kontainer sampah.
- Perlu sosialisasi pengelolaan sampah domestik oleh masyarakat melalui proses 3R.

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1		2	3	4	5
1	Penyusunan Laporan periodik volume sampah	Input	42.646.092	41.993.200	98,47
		Kinerja	5 buku	5 buku	100 %
		Output	Buku Laporan Periodik Volume Sampah Tahun 2017		
		Outcome	Tersedianya data timbunan sampah domestik Kebijakan persampahan		
2	Pembinaan dan Sosialisasi Pengelolaan Persampahan	Input	53.517.280	51.852.850	96,89
		Kinerja	1 x sosialisai Jumlah peserta sosialisasi = Narasumber =	1 x sosialisai Jumlah peserta sosialisasi = Narasumber =	100 %

		Output	Sosialisasi pengelolaan persampahan ke pengelola bank sampah dan sekolah sekolah
		Outcome	Terkelolanya sampah dengan metoda 3R Pengurangan timbunan sampah

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dilaksanakan kegiatan Anggaran yang disediakan sebesar Rp.96.163.372,- dengan realisasi sebesar Rp.93.846.050,- atau 97,59 %, dengan capaian kinerja 100%.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yaitu upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagai dampak negatif dari : (1) Masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (2) Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Strategi yang diutamakan adalah dengan melakukan tindakan preventif yaitu dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber pencemar dan mencegah masuknya bahan pencemar seperti sampah, limbah cair rumah tangga dan industri skala rumah tangga dan usaha kecil dan menengah (UKM), limbah peternakan dan perkebunan, limbah pabrik dan lain-lain masuk ke badan air. Hal ini dilaksanakan dengan melaksanakan Pemantauan, Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan, menambah sarana dan prasarana untuk pencegahan terjadinya pencemaran pada tanah, air dan udara. air.

Untuk itu pembangunan unit pengolah sampah melalui penerapan prinsip 3R (reused, reduced dan recycle) diharapkan dapat membantu mengurangi beban pencemaran sampah ke sungai sekaligus mendorong penerapan 3R . sedangkan untuk mengurangi beban limbah cair yang mencemari sungai, diharapkan dengan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan pembangunan teknologi biogas masalah pencemaran air sungai tersebut dapat sedikit teratasi. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan itu akan merupakan beban social, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Untuk mendukung Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dilakukan 10 jenis kegiatan yang dirinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Input	212.457.180	210.553.550	99,10 %
		Kinerja	Penilaian Adipura	Penghargaan Adipura Kota Kecil	100%
		Output	Terciptanya kota bersih dan teduh		
		Outcome	Meningkatnya kesehatan masyarakat		
3	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan	Input	53.208.620	41.479.550	77,96 %
		Kinerja	17 kegiatan	18 kegiatan	105,88 %
		Output	10 Buku Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup		
		Outcome	Pengelolaan lingkungan oleh pemrakarsa kegiatan menjadi lebih baik.		
4	Penunjang Operasional laboratorium	Input	109.941.356	108.004.250	98,24 %
		Kinerja	Lancarnya operasional labor & Pengadaan Zat Kimia Labor	Operasional Labor Pengadaan zat kimia labor	100 %
		Output	Lancarnya pelaksanaan operasional laboratorium		
		Outcome	Kelancaran pelaksanaan operasional laboratorium		
5	Pembinaan dan Pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Input	75.236.050	73.557.249	97,77 %
		Kinerja	5 lokasi calon kampung iklim dan 4 calon penerima penerima Kalpataru	5 lokasi calon kampung iklim dan 1 Nominasi penerima penerima Kalpataru	100%
		Output	- 7 lokasi kampung iklim, 3 penerima sertifikat - 4 calon penerima Kalpataru		
		Outcome	Meningkatnya kesadaran menjaga kelestarian lingkungan		
6	Pembuatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Input	30.031.556	29.825.000	99,31
		Kinerja	10 buah Buku SPM	10 buah Buku SPM	100 %
		Output	Buku Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lingkungan Hidup		
		Outcome	Tersedianya Buku Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lingkungan Hidup		
7	Koordinasi Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB) Th. 2017	Input	94.648.092	90.915.852	96,06 %
		Kinerja	Penilaian Kecamatan Bersih	Penilaian Kecamatan Bersih dan Nagari Bersih	100 %

		Output	Terciptanya kota bersih dan teduh		
		Outcome	Meningkatnya kesehatan masyarakat		
8	Sosialisasi Adiwiyata (Sekolah Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan)	Input	320.096.000	312.733.250	97,70%
		Kinerja	terlaksananya pembinaan sekolah Adiwiyata (20 sekolah)	terlaksananya pembinaan sekolah Adiwiyata (28 sekolah)	140 %
		Output	Tk. Kab = 10 sekolah Tk. Prop = 3 sekolah, Tk. Nas = 4 sekolah		
		Outcome	Program adiwiyata diterapkan di sekolah		
9	Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia di Kab. Pessel	Input	48.896.460	48.869.000	99,94 %
		Kinerja	1 x pelaksanaan peringatan hari lingkungan hidup sedunia tingkat kabupaten, 1 x pelaksanaan festival langkisau	1 x pelaksanaan peringatan hari lingkungan hidup sedunia tingkat kabupaten, 1 x pelaksanaan festival langkisau	100
		Output			
		Outcome			
10	Pengkajian Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan	Input	125.614.900	98.538.000	78,44 %
		Kinerja	Terlaksananya pengkajian dan penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan 1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	90 %
		Output	Buku dan Peta DDDT-LH Kab. Pesisir Selatan		
		Outcome	Analisa Jasa Ekosistem Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan		

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dilaksanaka kegiatan Anggaran yang disediakan sebesar Rp.1.070.130.214,- dengan realisasi sebesar Rp.1.014.475.701,- atau 94,80 %, dengan capaian kinerja 106,76%.

3. Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

Tabel 2.3
Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam Lingkungan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Pembahasan Dokumen AMDAL dan UKL/UPL	Input	112.771.266	108.329.900	96,06
		Kinerja	Terlaksananya pembahasan dokumen UKL-UPL dan SPPL 20 buah	SPPL = 48 bh, DPLH= 9 buah,UKL-UPL = 20 buah	385
		Output	UKL/UPL = 29 dok, SPPL = 34 dok		
		Outcome	Adanya izin lingkungan		
2	Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD) (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan / DIKPLH)	Input	168.442.252	166.443.711	98,81 %
		Kinerja	40 buah buku LSLHD	40 buah buku LSLHD	100 %
		Output	10 Buku SLHD		
		Outcome	Tersedianya data-data Status lingkungan hidup daerah Kabupaten Pesisir Selatan		
3	Inventarisasi Kegiatan yang Belum Memiliki Izin Lingkungan	Input	41.808.580	38.805.700	92,82 %
		Kinerja	15 kegiatan	30 kegiatan	250 %
		Output	Daftar inventarisasi kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan		
		Outcome	Pemrakarsa memahami dan melengkapi kegiatan dg dokumen lingkungan		
4	Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan	Input	51.960.320	38.725.200	74,53 %
		Kinerja	1 x sosialisasi Jumlah peserta = 80 org Narasumber = Kemen LHK dan DLH Kab. Pessel	1 x sosialisasi Jumlah peserta = 80 org (OPD, Camat & Pelaku Usaha) Narasumber = Kemen LHK dan DLH Kab. Pessel	100 %
		Output	1 x sosialisasi		
		Outcome	Meningkatnya pemahaman stakeholder mengenai penegakan hukum lingkungan		
5	Tindak Lanjut Pengaduan masyarakat bidang LH	Input	213.369.640	158.740.700	74,40 %
		Kinerja	8 kasus	8 kasus	100 %
		Output	Terfasilitasi pengaduan bidang lingkungan		
		Outcome	Terfasilitasi pengaduan bidang lingkungan		

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Program Pengendalian Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan dilaksanakan kegiatan Anggaran yang disediakan sebesar Rp.588.352.058,- dengan realisasi sebesar Rp.511.045.211,- atau 86,60 %, dengan capaian kinerja 133,57%.

4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian polusi dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, pelaksanaan program ini pada 1 kegiatan yaitu :

Tabel 2.4
Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Pengendalian Polusi

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Pemantauan Kualitas Sumber air Skala kabupaten	Input	59.013.180	58.418.700	98,99
		Kinerja	5 Sungai	8 sungai	160
		Output	Laporan Pemantauan		
		Outcome	Terpantaunya Kualitas sumber air		

Pencapaian target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, dimana terdapat 8 (delapan) program yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan tahun 2015 serta tahun 2016 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan serta Program Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, ADM Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah.

Tabel 2.5
Realisasi Anggaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2017(%)
		6	15=14/6 x100%
1	4	Rp	Rp
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	300.000.000	45,46
	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Bank Sampah dan 3R	150.000.000	34,57
	Penyusunan Laporan Periodik Volume Sampah	150.000.000	56,35
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.024.472.000	70,55
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	150.000.000	222,72
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	139.472.000	84,96
	Pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup	150.000.000	46,80
	Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia di Kabupaten Pesisir Selatan	100.000.000	55,97
	Penunjang Operasional Laboratorium	15.000.000	1.555,58
	Koordinasi Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB)	90.000.000	166,90
	Penilaian Kalpataru	180.000.000	19,03
	Pengkajian penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten pesisir selatan	150.000.000	65,69
	Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	3.398.000.000	38,81
	Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD)	300.000.000	80,27
	Pembahasan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL	2.000.000.000	10,47
	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	100.000.000	216,31
	Pembinaan Sekolah Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)	378.000.000	111,89
	Pembinaan dan Pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Pembinaan Pelaksanaan PROIKLIM & KALPATARU)	300.000.000	50,56
	Inventarisasi Kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan	75.000.000	51,74
	Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan	125.000.000	30,98
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	417.000.000	38,40
	Pemantauan Kualitas Media Skala Kabupaten	417.000.000	38,40
	Program pelayanan administrasi perkantoran	572.000.000	170,34
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35.000.000	130,40
	penyediaan jasa administrasi keuangan	60.000.000	189,83
	penyediaan jasa kebersihan kantor	65.000.000	174,99
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000	199,72
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000	157,30
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000	167,80
	Penyusunan RENSTRA	40.000.000	146,87

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	107,29
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000	131,21
	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000	182,09
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	135.000.000	193,77
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60.000.000	155,04
	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	55.000.000	164,21
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	190.000.000	361,15
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	70.000.000	238,36
	Pengadaan meubiler		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	55.000.000	132,21
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	65.000.000	606,53
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	167,45
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	167,45
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40.000.000	133,81
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	40.000.000	133,81
	TOTAL	7.991.472.000	69,41

Sumber : Laporan RKPD Dinas Lingkungan Hidup Triwulan IV Tahun 2017

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan perlu pelaksanaan beberapa penambahan program lagi yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dan Program Pelestarian Keanekaragaman Hayati Daerah Kab. Pesisir Selatan

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan antara lain meliputi: layanan jasa analisa laboratorium lingkungan, layanan AMDAL,/UKL/UPL, penanganan pengaduan masyarakat/sengketa lingkungan dan layanan informasi lingkungan. Masing-masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Layanan Jasa Analisa

Laboratorium Lingkungan Layanan jasa analisa laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan salah satu bagian dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan Laboratorium lingkungan hidup Daerah ini akan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan. Dari kurun tahun 2011 – 2017 Laboratorium Lingkungan Daerah telah menerima sampel/contoh uji sebanyak 397 sampel dengan rincian sebagai berikut :

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

Tabel 2.6
Jumlah Sampel yang Telah Diuji di Laboraturium
Dinas Lingkungan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2010-2016

No	Jenis Sampel	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah
1	Sungai	66		66	24	24	24	12	16	232
2	Laut	4				3	27	-	2	36
3	Air tanah	6				5	36	-	3	50
4	Hujan	4			1			-	-	5
5	Embung	2				2	6	-	1	11
6	Limbah			12	15	9	6	3	3	48
7	Udara					7	8	1	-	16
	Jumlah	82		78	40	50	107	15	25	397

Sumber : Laboraturium Dinas Lingkungan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2017

2.2.2 Layanan Rekomendasi Teknis Izin Lingkungan

Layanan AMDAL/UKL/UPL dan SPPL yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha yang membutuhkan rekomendasi dokumen lingkungan bagi kegiatan usaha yang akan dibangun. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan, Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas memberikan rekomendasi teknis terhadap izin lingkungan. Dalam implementasi kinerja pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau usaha yang telah memperoleh Pengesahan dan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan. Secara umum permasalahan dapat diatasi dengan cara melakukan koordinasi bersama sektor terkait dan aparat lapangan. Rekomendasi lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.7

2.2.3 Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat, Penegakan Hukum dan Penangan Sengketa Lingkungan

Semakin meningkatnya aktifitas perekonomian ditambah meningkatnya kepadatan penduduk, seringkali memunculkan sengketa lingkungan antar satu orang/kegiatan usaha/perusahaan dengan yang lainnya. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.7
Rekapitulasi Pelayanan Rekomendasi Lingkungan Tahun 2017

No.	NOMOR DAN TANGGAL REKOMENDASI	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	KAPASITAS	JENIS DOKUMEN	LOKASI USAHA
1	2	3	6	7	8	9
1.	660/01-II/P3K/DLH-PS/2017 28 Feb 2017	Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman	Pembangunan Pasar Tradisional Modern Koto Barapak Bayang	Luas lahan : 76,92 m Luas Bangunan : 23,56 m	UKL-UPL	Nagari Koto Barapak Kec. Bayang
2	660/02-III/P3K/DLH-PS/2017 13 Maret 2017	PT. Lancarjaya Mandiri Abadi	Stoner Crusher dn AMP	Stone Crusher : 150 m/Jam AMP : 63 Ton/Jam Luas Lahan : 2,38 Ha	DPLH	Nagari Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura
3	660/03-III/P3K/DLH-PS/2017 21 Maret 2017	CV. Salju Abadi	Pabrik Es Balok	Kapasitas 20 Ton/hari	UKL-UPL	Nagari Air Haji kec. Linggo Sari Baganti
4	660/04-III/P3K/DLH-PS/2017 24 Maret 2017	Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman	Peningkatan Ruas Jalan Tarusan – Carocok	Panjang Jalan : 4,5 Km	UKL-UPL	Nagari Ampang Pulai Nagari Jinang kampong Pansur Ampang Pulai Kec. Koto XI Tarusan
5	660/05-III/P3K/DLH-PS/2017 24 Maret 2017	Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman	Pembangunan Gerbang Rumah Toko Pasar Kuliner	Luas Bangunan Gerbang : 370 m Luas bangunan rumah toko Pasar kuliner : 262,5 m	UKL-UPL	Nagari Painan Selatan Kec. IV jurai
6	660/06-III/P3K/DLH-PS/2017 10 April 2017	Usaha Perseorangan Asri	Pertambangan Batuan	Luas Area 11,87 Ha 500 – 2.000 m Kapasitas Produksi	UKL-UPL	Nagari Painan Selatan Painan, Kecamatan Batang Kapas
7	660/07-III/P3K/	Dinas PUPR Kab. Pessel	Pembangunan Pasar	Luas Lahan 8.500 M	UKL –UPL	Nagari Kambang

	DLH-PS/2017 10 April 2017		Tradisional Moderen Kambang	Luas Bangunan 4.324 M		Barat dan Lakitan Utara Kec. Lenggayang
8	660/08-III/P3K/ DLH-PS/2017 10 April 2017	Dinas PUPR Kab. Pessel	Pembangunan SPAM IKK Koto Pulau	Panjang Transmisi Pipa 2 KM Luas Lahan Distribusi Pipa 0,33 Ha	UKL-UPL	Nagari Kambang Timur Kec. Lenggayang
9	660/09-III/P3K/ DLH-PS/2017 11 April 2017	KKI Warsi	Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga	0,023 – 0,040 m / Kg Kotoran Sapi	SPPL	Nagari Pondok Parian Lunang, Kec. Lunang
10	660/10-III/P3K/ DLH-PS/2017 11 April 2017	KKI Warsi	Pembangunan Rice Milling Unit / RMU/Heller	600 – 800 Kg / Jam	SPPL	Nagari Pondok Parian Lunang, Kec. Lunang
11	660/11-III/P3K/ DLH-PS/2017 11 April 2017	KKI Warsi	Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga	0,023 – 0,040 m / Kg Kotoran Sapi	SPPI	Pancung Taba Kec.IV Nagari Bayang Utara
12	660/12-III/P3K/ DLH-PS/2017 11 April 2017	KKI Warsi	Pengelolaan Energi Terbarukan / Pembangunan Instalasi Biogas Skala rumah Tangga	0,023 – 0,040 m / Kg Kotoran Sapi	SPPL	Pasar Malintang Nagari Kampung Tengah Tapan Kec. Ranah Ampek Hulu
13	660/13-III/P3K/ DLH-PS/2017 11 April 2017	KKI Warsi	Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga	0,023 – 0,040 m / Kg Kotoran Sapi	SPPI	Nagari Kambang Timur Kec. Lenggayang Kab. Pessel
14	660/14-III/P3K/ DLH-PS/2017 12 April 2017	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Pembangunan Mess Gor H. Ilyas Yacub Painan	Luas Bangunan 858 m	UKL - UPL	Nagari Painan Timur Kec. IV Jurai
15	660/15-III/P3K/ DLH-PS/2017 12 April 2017	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Pembangunan Auditorium Kantor Bupati	Luas Lahan 2.700 m Luas Bangunan 2.480 m	UKL - UPL	Nagari Painan Kec. IV Jurai
16	660/16-III/P3K/ DLH-PS/2017 12 April 2017	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Pembangunan IPAL Komunal Nagari Painan Selatan Painan	Jml Samb Rumah : 572 Unit Debit air Limbah : 286 m / hari	UKL - UPL	Nagari Painan Selatan Painan Kec. IV Jurai

				Keb Lahan : 235 m		
17	660/17-III/P3K/ DLH-PS/2017 12 April 2017	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Pembangunan IPAL Komunal Nagari Painan Timur	Luas Bangunan : 75 m	UKL - UPL	Nagari Painan Timur Kec. IV Jurai
18	660/18-III/P3K/ DLH-PS/2017 12 April 2017	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Pembangunan IPAL Komunal	Jml Sambungan Rumah :709 Unit Debit air Limbah : 354,5 m / hari Keb Lahan : 290 m	UKL - UPL	Nagari Painan Utara
19	660/19-III/P3K/ DLH-PS/2017 20 April 2017	Direktur CV. Ziqri Bersaudara	Pertambangan Batuan	Luas area WIUP : ± 10.58 Ha IUP : ± 10.58 Ha Luas Pengambilan : 2,68 Ha Vol Pengambilan : 49,641 Ha	UKL -UPL	Kamp Danau Betung Nagari Sungai Sirah Kec. Silaut Kab. Pessel
20	660/20-III/P3K/ DLH-PS/2017 28 April 2017	Direktur Utama PT. Alif Syahdilla Pratama	Pertambangan Batuan	Luas Pengambilan : 5 Ha Kap Produksi : 38.876.82 m	UKL -UPL	Nagari Gurun Panjang Selatan Kec. Bayang Selatan
21	660/21-III/P3K/ DLH-PS/2017 8 Mai 2017	Direktur CV. Dayi Daya Abadi	Pembangunan Hotel Rumah Amak	Luas Lahan : 1.095 m Jml Kamar : 20 Kamar	UKL - UPL	Nagari Painan Kec. IV Jurai
22	660/22-III/P3K/ DLH-PS/2017 8 Mai 2017	Ka. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab, Pessel	Luas Lahan : 2.500 m Luas Lantai : 3.002 m (2 Lantai)	UKL - UPL	Nagari Painan Timur Painan Kec.IV Jurai
23	660/23-III/P3K/ DLH-PS/2017 8 Mai 2017	Ka. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman & Pertanahan Kec. Pesssel	Pembangunan Rumah Nelayan Pantai Carocok Painan	Luas Lahan : 10.000 m Jml Rumah : 50 Unit	UKL - UPL	Nagari Painan Selatan Painan Kec.IV Jurai Painan.
24	660/24-V/P3K/DLH- PS/2017 19 Mai 2017	PT. Telkomsel	Pembangunan BTS-CSR PT. Telkomsel Nagari Mandeh	Tinggi 36 m Kapasitas Produksi 2-3 km ²	SPPL	Nagari Mandeh Kec. Koto XI Tarusan
25	660/25-V/P3K/DLH-	PT. Telkomsel	Pembangunan BTS CSR	Tinggi 36 m	SPPL	Nagari Sungai

	PS/2017 19 Mai 2017		PT. Telkomsel nagari Sungai Nyalo	Kapasitas Produksi 2-3 km ²		Nyalo Kec. Koto XI Tarusan
26	660/26-V/P3K/DLH- PS/2017 19 Mai 2017	PT. Taruko Putra Nusantara	Penambangan Batuan	Luas Lahan 3.607 Ha Kapasitas Produksi 161.948,70m ³ /tahun	UKL-UPL	Kampung Mesin Gergaji Nagari Tambang Kec. IV Jurai
27	660/27-VI/P3K/ DLH-PS/2017 22 Juni 2017	Hotel Giszella	Pembangunan Giszella Hotel	Luas Lahan 500 m ² Jumlah Kamar 15 kamar	DPLH	Nagari Pasar Baru Kec. Bayang
28	660/28-VIII/P3K/ DLH-PS/2017 4 Agustus 2017	PT. Andalas Mining Resources	Pembangunan Stone Crusher	Kapasitas Produksi 40 m ³ /jam Luas lahan 15.000 m ²	UKL-UPL	Nagari Sungai Sirah Kec.Linggo Sari Baganti
29	660/29-VIII/P3K/ DLH-PS/2017 4 Agustus 2017	Kelompok Tani perempuan- Bayang Bungo Indah (BBI) WALHI	Rumah Produksi Pala	Kapasitas Produksi 10 kg/minggu. Luas RP 7x10,5 m ²	SPPL	Nagari Kapujan Koto Barapak Kec. Bayang
30	660/30-VIII/P3K/ DLH-PS/2017 4 Agustus 2017	Kelompok Tani Perempuan- Badan Usaha mandiri IBU WALHI	Rumah Produksi Kakao	Kapasitas Produksi 10 Kg/minggu Luas Rumah Produksi 10 x 9,5 m ²	SPPL	Nagari Barung- Barung Belantai Selatan Kec. Koto XI Tarusan.
31	660/31-IX/P3K/ DLH-PS/2017 11 September 2017	BPBD	Pembangunan Jembatan Beton Sungai Tanuak	Panjang jembatan 12 x 4 m	SPPL	Nagari Sungai Tanuak kec. Koto XI tarusan
32	660/32-IX/P3K/ DLH-PS/2017 11 September 2017	BPBD	Pembangunan Jembatan Beton Sungai Taluak Nibung	Panjang jembatan 6 x 4 m	SPPL	Kec. IV Jurai
33	660/33-IX/P3K/ DLH-PS/2017 11 September 2017	BPBD	Pembangunan Jembatan Kampung Tengah 2	Panjang jembatan 6 x 4 m	SPPL	Kec. Rahul
34	660/34-IX/P3K/ DLH-PS/2017 18 September 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Baru Tabek Puluik-Puluik Nagari Puluik-Puluik	Panjang jalan 2.500 m lebar 8 m	SPPL	Nagari Puluik- Puluik Kec. Bayang
35	660/35-IX/P3K/ DLH-PS/2017 18 September 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Baru Bukit Pulai Sungai Bungin	Panjang jalan 3.000 m lebar 8 m	SPPL	Nagari IV Koto Hilie Kec. Batang Kapas

36	660/36-IX/P3K/ DLH-PS/2017 18 September 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Baru Nagari Kapuh	Panjang jalan 2.200 m lebar 8 m	SPPL	Nagari Kapuh Kec. Koto XI Tarusan
37	660/37-IX/P3K/ DLH-PS/2017 18 September 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Baru Solok Bukit Garapai Nagari Gurun Panjang	Panjang jalan 2.500 m lebar 8 m	SPPL	Nagari Gurun Panjang Kec. Bayang
38	660/38-IX/P3K/ DLH-PS/2017 18 September 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Baru Lariang Kilo Limo nagari Salido Sari Bulan	Panjang jalan 1.500 m lebar 8 m	SPPL	Nagari Salido Sari Bulan Kec. IV Jurai
39	660/39-IX/P3K/ DLH-PS/2017 18 September 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Baru Air Limau Kambang Nagari Koto nan Ampek	Panjang jalan 4000 m lebar 8 m	SPPL	Nagari Koto Nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan
40	660/40-IX/P3K/ DLH-PS/2017 18 September 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Baru Bukit Batu Mama batu Kalang Ampang Pulau	Panjang jalan 3.500 m lebar 8 m	SPPL	Nagari Amapng Pulai Kec Koto XI Tarusan
41	660/41-IX/P3K/ DLH-PS/2017 18 September 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Baru Lereng Bukit Putus sawah Laweh	Panjang jalan 2.200 m lebar 8 m	SPPL	Nagari Pasar Baru Kec. Bayang
42	660/42-IX/P3K/ DLH-PS/2017 18 September 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Baru Kp. Tj. Mudiak Air Nagari S. Nyalo	Panjang jalan 3.200 m lebar 8 m	SPPL	Nagari Sungai Nyalo Kec. Koto XI Tarusan
43	660/43-IX/P3K/ DLH-PS/2017 18 September 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Baru Kp. Koto Sawah Rawang Nagari Sungai Pinang	Panjang jalan 3.500 m lebar 8 m	SPPL	Nagari Sungai Pinang Kec. Koto XI Tarusan
44	660/44-IX/P3K/ DLH-PS/2017 18 September 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Pariwisata Nagari Sungai Pinang	Panjang jalan 3.200 m lebar 8 m	SPPL	Nagari Sungai Pinang Kec. Koto XI Tarusan
45	660/45-IX/P3K/ DLH-PS/2017 18 September 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Usaha Tani Nagari Sungai Pinang	Panjang jalan 4000 m lebar 8 m	SPPL	Nagari Sungai Pinang Kec. Koto XI Tarusan
46	660/46-IX/P3K/ DLH-PS/2017 18 September 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Baru Baliak Bukit Batu Banyak Nagari Koto Taratak	Panjang jalan 2.000 m lebar 8 m	SPPL	Nagari Koto Taratak Kec. Sutera

47	660/47-IX/P3K/ DLH-PS/2017 18 September 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Lingkar Kubang Lubuk Kilangan Nagari Puluik2 selatan	Panjang jalan 3.500 m lebar 8 m	SPPL	Nagari Puluik2 Selatan Kec.Bayu
48	660/48-IX/P3K/ DLH-PS/2017 18 September 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Lingkar Kubang Lubuk Kilangan Nagari Puluik2 selatan	Panjang jalan 3.500 m lebar 8 m	SPPL	Nagari Puluik2 Selatan Kec.Bayu
49	660/49-IX/P3K/ DLH-PS/2017 18 September 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Produksi Singkulan Nagari Koto Nan Tigo Utara	Panjang jalan 4.000 m lebar 8 m	SPPL	Kec. Sutera
50	660/50-IX/P3K/ DLH-PS/2017 18 September 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Baru Lb. Asam Sakayu Nagari Taluak Tiogo Sakao Kec. Btg. Kapas	Panjang jalan 3.000 m lebar 8 m	SPPL	Kec. Batang Kapas
51	660/51-IX/P3K/ DLH-PS/2017 22 September 2017	Hotel Andhika	Hotel Andhika	12 Kamar	SPPL	Nagari Painan Kec IV Jurai
52	660/52-IX/P3K/ DLH-PS/2017 13 Oktober 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Nagari Koto Nan Tigo Utara Nagari Rawang Gunung Malelo Kec. Sutera	Panjang jalan 3.000 m lebar 6 m	SPPL	Kec Sutera
53	660/53-IX/P3K/ DLH-PS/2017 13 Oktober 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Timbulun Taratak Nagari Koto Taratak Kec. Sutera	Panjang jalan 2.000 m lebar 8 m	SPPL	Nagari Koto Taratak Kec. Sutera
54	660/54-IX/P3K/ DLH-PS/2017 13 Oktober 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Baru Labuah Sampik-Sumur Dagang Nagari Punggasan Timur Kec. LSB	Panjang jalan 3.000 m lebar 6 m	SPPL	Nagari Punggasan Timur Kec. LSB
55	660/55-IX/P3K/	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Baru	Panjang jalan 3.000 m	SPPL	Nagari Lagan

	DLH-PS/2017 13 Oktober 2017		Lagan Mudik Kec. LSB	lebar 6 m		Mudik Kec. LSB
56	660/56-IX/P3K/ DLH-PS/2017 13 Oktober 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Baru Kp. Sungai Sirah Nagari Lunang Utara Kec Lunang	Panjang jalan 1.300 m lebar 8 m	SPPL	Nagari Lunang Utara Kec. Lunang
57	660/57-IX/P3K/ DLH-PS/2017 13 Oktober 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Baru Kp. Lb. Setepung Nagari Lunang Kec. Lunang	Panjang jalan 3.000 m lebar 8 m	SPPL	Nagari Lunang Kec. Lunang
58	660/58-IX/P3K/ DLH-PS/2017 13 Oktober 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Baru Kp. Bukit Putus Nagari Tebing Tinggi Tapan Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Panjang jalan 3.000 m lebar 7 m	SPPL	Nagari Tebing Tinggi Tapan Kec Ranah Ampek Hulu Tapan.
59	660/59-IX/P3K/ DLH-PS/2017 13 Oktober 2017	BPBD	Rekonstruksi	Panjang jalan 80 m lebar 4,5 m	UKL-UPL	Nagari Tebing Tinggi Tapan Kec Ranah Ampek Hulu Tapan.
60	660/60-X/P3K/DLH- PS/2017 13 Oktober 2017	Dinas Perkimtan	Pembukaan jalan lingkung Mandeh Kec. Koto XI Tarusan	Panjang 192 m Lebar 5,5 m Jumlah tanah urug 664 m ³	SPPL	Nagari Mandeh Kec. Koto XI Tarusan
60.a	660/60.a-X/P3K/ DLH-PS/XI/2017 17 November 2017	Dinas PUPR	Pembangunan Jembatan Gantung Dukun Salak	Panjang 70 M	UKL-UPL	Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas
61	660/61-XI/P3K/ DLH-PS/2017 22 November 2017	Dinas PUPR	Pembukaan jalan baru ruas jalan sungai landai Nagari Kapuh Utara Kec Koto XI Tarusan	Panjang 2000 m Luas 8 m	SPPL	Nagari Kapuh Utara Kec. Koto XI Tarusan
62	660/62-XI/P3K/ DLH-PS/2017 22 November 2017	Dinas PUPR	Pembukaan jalan Baru Batuang Air Terjun Nagari Puluik-Puluik Kec. Bayang Utara	Panjang 2000 m Lebar 8 m	SPPL	Nagari Puluik- Puluik Bayang Utara
63	660/63-XI/P3K/ DLH-PS/2017	Dinas PUPR	Pembukaan jalan baru Petai Batuang Nagari	Panjang 3.000 m Luas 8 m	SPPL	Nagari Puluik- Puluik Bayang

	22 November 2017		Puluik-Puluik Kec. Bayang Utara			Utara
64	660/64-XI/P3K/ DLH-PS/2017 22 November 2017	Dinas PUPR	Pembukaan jalan baru Bukit Lintang Rawang Kuranji Nagari Taluak Tigo Sakato Kec. Batang Kapas.	Panjang 2.000 m Luas 8 m	SPPL	Bukit Lintang Rawang Kuranji Nagari Taluak Tigo Sakato Kec. Batang Kapas
65	660/65-XI/P3K/ DLH-PS/2017 22 November 2017	Dinas PUPR	Pembukaan jalan baru Nagari Koto Nan Tigo Utara Kec. Sutera	Panjang 2.500 m Luas 8 m	SPPL	Batu Kandang Nagari Koto Nan Tigo utara Kec. Sutera
66	660/66-XI/P3K/ DLH-PS/2017 28 November 2017	CV. Mandala Karya	Perumahan D.Gunung Garden	Jumlah rumah 32 unit Luas 3.820 m ²	SPPL	Nagari Surantih Kec. Sutera
67	660/67-XI/P3K/ DLH-PS/2017 28 November 2017	CV. Mandala Karya	Perumahan D.Gunung Garden	Jumlah rumah 20 unit Luas 1.562 m ²	SPPL	Belakang Pasar Surantih Kec. Sutera
68	660/68-XI/P3K/ DLH-PS/2017 30 November 2017	PT. Tigo Padusi Nusantara	Penambangan Galian C	Luas lahan pengambilan 500Ha Panjang 690 m Vol 248.938.665 m ³ /dtk	UKL-UPL	Nagari Koto Rawang Kec. IV Jurai
69	660/69-XI/P3K/ DLH-PS/2017 30 November 2017	PT. Batang Kapas Mitra Usaha	SPBU	Luas lahan 2.500 m ²	UKL-UPL	Nagari Koto Salapan Kec. Ranah Pesisir
70	660/70-XI/P3K/ DLH-PS/2017 30 November 2017	PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL)	Stone Crusher	Kapasitas 30 ton/jam Luas lahan 2.500 m ²	UKL-UPL	Nagari Silaut Kec. Silaut
71	660/71-XI/P3K/ DLH-PS/2017 30 November 2017	PT. Andalas Mining Resources (AMR)	Penambangan Batuan Sungai	Volume pengambilan 8.267.100m ³ luas 0,96 Ha Panjang 165 m	UKL-UPL	Nagari Tanah Bakali Kec. Air Pura
71.a	660/71.a-XI/P3K/	Dinas PUPR	Pembangunan	Panjang 96 m	UKL-UPL	Nagari Duku Kec.

	DLH-PS/2017 30 November 2017		Jembatan Bukik Kaciak			Koto XI Tarusan
72	660/72-XII/P3K/ DLH-PS/2017 15 Desember 2017	Dinas PUPR	Pembukaan Jalan Tambang Bungo Pasang III	Panjang 2.000 m Lebar 8 m	SPPL	Nagari Tampuniak Bungo Pasang II Kec. IV Jurai
72.a	660/72.a-XI/P3K/ DLH-PS/2017 30 November 2017	Dinas PUPR	Pembangunan Jembatan Nyiur Gading	Panjang 40 m	SPPL	Nagari Kambang Timur Kec. Lengayanf
73	660/73-XII/P3K/ DLH-PS/2017 18 Desember 2017	Dinas Kesehatan	Pembangunan Puskesmas Tarusan	Luas Lahan 5.030 m ² Luas bangunan 1.362 m	DPLH	Nagari Nanggalo Kec. Tarusan
74	660/74-XII/P3K/ DLH-PS/2017 27 Desember 2017	Dinas Pertanian	Pembangunan Jl. Produksi Kp. Dusun Baru	Panjang. 1000 m Lebar 3,5 m	SPPL	Kp. Dusun Baru Nagari Palangai Kec. Ranah Pesisir
75	660/75-XII/P3K/ DLH-PS/2017 27 Desember 2017	Dinas Pertanian	Pembangunan Jl. Produksi Kp. Koto Taratak	Panjang. 1000 m Lebar 3,5 m	SPPL	Kp. Koto Taratak Nagari Koto Taratak Kec. Sutera.
76	660/76-XII/P3K/ DLH-PS/2017 27 Desember 2017	Dinas Kesehatan	Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Pusk. Surantih	Luas lahan 2.020,70 m ² Luas Bangunan 592 m ²	DPLH	Nagari Surantih Kec. Sutera
77	660/77-XII/P3K/ DLH-PS/2017 27 Desember 2017	Dinas Kesehatan	Puskesmas Inderapura	Luas lahan 1.073 m ² Luas Bangunan 582 m ²	DPLH	Nagari Sp.Lama Inderapura Kec. Pancung Soal
78	660/78-XII/P3K/ DLH-PS/2017 27 Desember 2017	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kambang	Luas lahan 2.000 m ² Luas Bangunan 1.016,70 m ²	DPLH	Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang
79	660/79-XII/P3K/ DLH-PS/2017 27 Desember 2017	Dinas Kesehatan	Puskesmas Koto Baru	Luas lahan 5.000 m ² Luas Bangunan 1.553 m ²	DPLH	Nagari Kambang Kecamatan Lengayang
80	660/80-XII/P3K/ DLH-PS/2017	PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi	Pembangunan Stone Crusher dan AMP	Kapasitas SC 150 m ³ Kapasitas AMP 63 m ³	UKL-UPL	Nagari Sungai Sirah Air Haji

	27 Desember 2017					Kecamatan Linggo Sari Baganti
81	660/81-XII/P3K/ DLH-PS/2017 27 Desember 2017	Dinas Koperindagtam Pasar	Pembangunan Pasar Rakyat Tapan	Luas Lahan 3,5 Ha	DPLH	Nagari Batang Betung Kecamatan Basa IV Balai Tapan
82	660/82-XII/P3K/ DLH-PS/2017 27 Desember 2017	Dinas Koperindagtam Pasar	Pembangunan Pasar Rakyat Mandeh	Luas Lahan 8.000 m ²	DPLH	Nagari Carocok Anau Kec. Koto XI Tarusan

Sumber : Laporan Kegiatan Pembahasan Dokumen AMDAL, UKL/UPL Tahun 2017 dan

Kegiatan Inventarisasi Kegiatan yang Belum Memiliki Izin Lingkungan Tahun 2017

Tabel 2.7

Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

No	Kasus Lingkungan Hidup	Lokasi	Kronologis / Gambaran Umum Kasus	Tindak Lanjut / Penanganan yang telah Dilakukan	Status	Ket
1	Limbah Medis Di Pantai Tan Sridano	Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas	Informasi dari masyarakat pada tanggal 21 Desember 2016 bahwa ditemukannya sejumlah besar limbah berbahaya dab beracun medis dari sumber yang tidak diketahui berserakan di sepanjang Kawasan Pantai Tan Sridano Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas	telah ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan antara tim DLH Kab. Pessel, Camat Batang Kapas dan Wali Nagari Taluak pada tanggal 29 Desember 2016 dan pada tanggal 18 Januari 2017 oleh Tim Penegakan Hukum Lingkungan Provinsi Sumatera Barat dan Tim Kabupaten Pesisir Selatan	Di fasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat karena pembuang limbah RSUD Rasidin Padang berada di Kota Padang	Terfasilitasi
2	PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi	Kec. Lubuk Pinang Kabupaten Muko-Muko	Pencemaran Lingkungan Akibat Bocornya Limbah Pabrik CPO Sawit PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi yang terjadi pada tanggal 5 Juni 2015 mengakibatkan banyaknya ikan yang mati diperaian tersebut, air sungai berubah warna sehingga tidak bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. dugaan pencemaran terjadi selama 5 jam dari jam 10.00 WIB s/d 15.00 WIB. Setelah jam 15.00 WIB turun hujan dan air sungai Serik kembali berwarna normal seperti biasa. Air sungai digunakan untuk MCK	telah ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan pada tanggal 9 Juni 2015 dan kasus ini secara administrasi merupakan kasus lintas provinsi dimana kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi berada di Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu, sedangkan yang menerima dampak dari kegiatan ini adalah masyarakat Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera barat maka BLH Kab. Pessel mengirimkan surat kepada Bapedalda Provinsi untuk melakukan verifikasi lanjutan dengan Nomor Surat 660/108/TL-PHL/BLH-PS/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015. dan	Terfasilitasi	Terfasilitasi

				diverifikasi lanjutan oleh Tim Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 30 November s/d 2 Desember 2016. Pada tanggal 11-13 April 2017 Tim KLHK dan DLH Kab. Pesisir Selatan menindaklanjuti dengan turun ke PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi Muko-Muko		
3	PT. Incasi Raya Sodekan POM	Kec. Pancung Soal	Masyarakat pengadu (Jumadil, Mulyadi, Armensyah Arbi) meminta percepatan	telah ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan pada tanggal 26 Februari 2016, dan pihak perusahaan sedang melakukan proses pembersihan enceng gondok di Batang Sindang.	Telah diambil alih oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Telah diambil alih oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
			Adanya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran air sungai oleh PT. Incasi Raya Sodekan POM ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	telah ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan antara Tim KLHK, Bapedalda Provinsi Sumbar dan BLH Kab. Pessel pada tanggal 1 s/d 4 Juni 2016.		
			Tentang Tindak lanjut Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup antara Muhammad Syah dan PT. Incasi Raya	Telah ditindaklanjuti dengan pertemuan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Luar pengadilan antara Muhammad Syah dengan PT. Incasi raya pada tanggal 10 Oktober 2017		
4	CV. Mutia Anugerah	Nagari Inderapura Timur Kecamatan Air	Pengaduan masyarakat terhadap kegiatan	telah ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan	Terfasilitasi	Terfasilitasi

		Pura	penambangan yang dilakukan oleh CV.Mutia Anugerah, masyarakat menolak dan meminta mengkaji ulang seluruh izin yang dimiliki pemilik kegiatan	bersama tim terpadu dari DLH Prov.Sumatera Barat,Ahli Hukum Lingkungan UNAND,Dinas ESDM Prov.Sumatera Barat,Dinas PSDA Prov.Sumatera barat,DLH Kab.Pesisir Selatan dan Dinas PSDA Kab.Pesisir Selatan pada tanggal 23 Mei 2017.		
5	PLTMH Sako Nagari Sungai Gambir	Nagari Sungai Gambir Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Pada tanggal 26 September 2017 telah masuk surat ke Dinas Lingkungan Hidup Kab.Pesisir Selatan dari Forum Musyawarah Wali Nagari dan Masyarakat Se Kecamatan ranah Ampek Hulu dan Basa Ampek Balai Tapan Daerah Aliran Muaro sako tanggal 20 Juni 2017 mengenai dugaan pencemaran pada badan sungai batang sako yang diduga akibat aktifitas kegiatan pembangunan PLTMH Sako Tapan	telah ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan antara tim DLH Kab. Pesisir Selatan,Camat Ranah Ampek Hulu pada tanggal 14 Desember 2017	Terfasilitasi	Terfasilitasi
6	Kasus Mandeh	Kecamatan Koto XI Tarusan	Adanya keresahan masyarakat terkait rusaknya hutan bakau seluas 1,2 hektare di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan	telah ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 20-27 April 2017	Ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
7	CV. Bangun Indo Jati	Nagari Limau Purut Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Kelompok Tani Lubuk Begalung Bawah Bandar Mandiri melaporkan sawah mereka kerap kali kering sampai tanahnya rekah,maka dari itu CV.Bangun Indo Jati diharapkan untuk membangun tanggul kiri jalan masuk ke Quarry(galian C), tanggul setinggi tebing sawah	-	-	-

			kelompok tani Lubuk Begalung Bawah Bandar Mandiri Nagari Limau Purut Kec.Ranah Ampek Hulu Tapan			
8	PT.Era Bangun Towerindo	Kampung Koto Nagari Salido Kec. IV Jurai	Adanya keresahan masyarakat terkait rencana pembangunan menara telekomunikasi baru oleh PT.Era Bangun Towerindo.Apabila sewaktu-waktu datang angin/badai,dan masyarakat sangat meragukan keberadaan menara telekomunikasi yang berdiri didekat pemukiman masyarakat yang nantinya akan menimbulkan malapetaka bagi masyarakat sekitarnya.	-	-	-

Sumber : Laporan Kegiatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2017

Disamping pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti tersebut di atas, kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup juga harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008. Adapun Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang harus disediakan adalah : 1) Pengendalian pencemaran air dari sumber bergerak. 2) Pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. 3) Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan/ atau perusak lingkungan 4) Penginformasian status kerusakan tanah untuk produksi biomassa :

Tabel 2.9
Realisasi/Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Pesisir Selatan

No	Jenis Pelayanan	Target Nasional		Realisasi di Daerah		Ket
		Tahun	%	Tahun	%	
1.	Pencegahan pencemaran air	2009	20	2009	20	
		2010	40	2010	45	
		2011	60	2011	60	
		2012	80	2012	75	
		2013	100	2013	75	
		2014	100	2014	80	
		2015	100	2015	26	
		2016	100	2016	42,10	
2.	Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	2009	20	2009	20	
		2010	40	2010	44,55	
		2011	60	2011	55,56	
		2012	80	2012	81,5	
		2013	100	2013	82	
		2014	100	2014	85	
		2015	100	2015	100	
		2016	100	2016	20	
3.	Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	2009	20	2009	20	
		2010	40	2010	45	
		2011	60	2011	55,44	
		2012	80	2012	78,5	
		2013	100	2013	78,5	
		2014	100	2014	85	
		2015	100	2015	100	
		2016	100	2016	100	
4.	Tindak lanjut pengaduan masyarakat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	2009	50	2009	50	
		2010	60	2010	100	
		2011	70	2011	100	
		2012	80	2012	100	
		2013	90	2013	100	
		2014	90	2014	90	
		2015	100	2015	100	
		2016	100	2016	100	

Sumber : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi SPM Bidang LH

Kab. Pesisir Selatan Tahun 2017

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup mengalami beberapa permasalahan yaitu (1) kurangnya jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang pada saat ini dibantu oleh tenaga honorer ; (2) rendahnya kualifikasi spesifikasi ASN di bidang lingkungan hidup, terutama yang memiliki sertifikat keahlian bidang lingkungan hidup seperti pejabat/petugas pengawas lingkungan, AMDAL A dan AMDAL C ; (3) Kurangnya sarana prasarana, terutama kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 serta perlengkapan dan peralatan lapangan (K3) ; (4) Tingginya pencemaran lingkungan ; dan (5) Rendahnya kesadaran pemrakarsa mengurus dokumen lingkungan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Usulan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2018 yang disusun pada Tahun 2017 dengan 9 jumlah program dan 68 kegiatan dengan total dana Rp.6.882.000,- yang diprediksi pada saat itu Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 sebesar Rp.6.177.000,- dapat dilihat pada lampiran pada dokumen ini. Setelah dilaksanakan Forum OPD 2018 dan Forum Musrenbang 2018 maka usulan Tahun 2018 menjadi Rp.15.827.000.000,-

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang ditampung Forum Musrenbang Kecamatan dan Nagari yang ditampung pada Tahun 2017 telah diusulkan pada RKPD Tahun 2017 tapi belum ditampung dalam APBD Tahun 2018 maka diusulkan kembali pada Rencana Kerja Tahun 2019 ini dengan total Rp.8.750.000.000,- dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Usulan Forum Musrenbang dari Kecamatan dan Nagari
Pada Forum OPD Tahun 2017

NO	KEGIATAN	KECAMATAN YG MENGUSULKAN	UNIT	ANGGARAN
23	Pengadaan Bank sampah	Koto XI Tarusan	1 unit	75.000.000
		Bayang	1 unit	75.000.000
		IV Nagari Bayang Utara	1 unit	75.000.000
		IV Jurai	1 unit	75.000.000
		Batang kapas	1 unit	75.000.000
		Sutera	1 unit	75.000.000
		Lengayang	1 unit	75.000.000
		Ranah Pesisir	1 unit	75.000.000
		Linggo Sari Baganti	1 unit	75.000.000
		Airpura	1 unit	75.000.000

		Pancung Soal	1 unit	75.000.000
		Basa Ampek Balai Tapan	1 unit	75.000.000
		Ranah Ampek Hulu Tapan	1 unit	75.000.000
		Lunang	1 unit	75.000.000
		Silaut	1 unit	75.000.000
24	Pengadaan Motor Sampah	Koto XI Tarusan	1 unit	52.500.000
		Bayang	1 unit	52.500.000
		IV Nagari Bayang Utara	1 unit	52.500.000
		IV Jurai	1 unit	52.500.000
		Batang kapas	1 unit	52.500.000
		Sutera	1 unit	52.500.000
		Lengayang	1 unit	52.500.000
		Ranah Pesisir	1 unit	52.500.000
		Linggo Sari Baganti	1 unit	52.500.000
		Airpura	1 unit	52.500.000
		Pancung Soal	1 unit	52.500.000
		Basa Ampek Balai Tapan	1 unit	52.500.000
		Ranah Ampek Hulu Tapan	1 unit	52.500.000
		Lunang	1 unit	52.500.000
		Silaut	1 unit	52.500.000
25	Pembangunan Gedung 3R	Bayang	1 unit	200.000.000
		Lengayang	1 unit	200.000.000
		Basa Ampek Balai Tapan	1 unit	200.000.000
26	Pengadaan Tong Sampah	Koto XI Tarusan	10 Buah	22.500.000
		Bayang	10 Buah	22.500.000
		IV Nagari Bayang Utara	10 Buah	22.500.000
		IV Jurai	10 Buah	22.500.000
		Batang kapas	10 Buah	22.500.000
		Sutera	10 Buah	22.500.000
		Lengayang	10 Buah	22.500.000
		Ranah Pesisir	10 Buah	22.500.000
		Linggo Sari Baganti	10 Buah	22.500.000
		Airpura	10 Buah	22.500.000
		Pancung Soal	10 Buah	22.500.000
		Basa Ampek Balai Tapan	10 Buah	22.500.000
		Ranah Ampek Hulu Tapan	10 Buah	22.500.000
		Lunang	10 Buah	22.500.000
		Silaut	10 Buah	22.500.000
27	Pengadaan Gantungan Sampah	Koto XI Tarusan	10 Buah	20.000.000
		Bayang	10 Buah	20.000.000
		IV Nagari Bayang Utara	10 Buah	20.000.000
		IV Jurai	10 Buah	20.000.000
		Batang kapas	10 Buah	20.000.000
		Sutera	10 Buah	20.000.000

		Lengayang	10 Buah	20.000.000
		Ranah Pesisir	10 Buah	20.000.000
		Linggo Sari Baganti	10 Buah	20.000.000
		Airpura	10 Buah	20.000.000
		Pancung Soal	10 Buah	20.000.000
		Basa Ampek Balai Tapan	10 Buah	20.000.000
		Ranah Ampek Hulu Tapan	10 Buah	20.000.000
		Lunang	10 Buah	20.000.000
		Silaut	10 Buah	20.000.000
28	Pengadaan TPS	Koto XI Tarusan	1 unit	50.000.000
		Bayang	1 unit	50.000.000
		IV Nagari Bayang Utara	1 unit	50.000.000
		IV Jurai	4 unit	200.000.000
		Batang kapas	1 unit	50.000.000
		Sutera	1 unit	50.000.000
		Lengayang	1 unit	50.000.000
		Basa IV Balai Tapan	2 unit	100.000.000
29	Pengadaan TPA	Basa IV Balai Tapan	1 unit	5.000.000.000
	Jumlah			8.750.000.000,-

Sumber : Forum OPD Tahun 2017

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PESISIR SELATAN

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional

Dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Visi-Misi Presiden serta Agenda Prioritas Pembangunan (NAWA CITA), maka tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 adalah mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Sasaran pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 adalah Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, dengan sasaran: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Tujuan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari untuk kesejahteraan rakyat, dan menuju pada pembangunan berkelanjutan melalui arah kebijakan bagian dari Pengarus-utamaan dan Pembangunan Lintas Bidang : Peningkatan kualitas lingkungan hidup nasional, Penurunan emisi gas rumah kaca, penerapan pola konsumsi dan produksi ramah lingkungan, Pengarus-utamaan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan, Pengarus-utamaan pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan penataan ruang nasional sebagai pengungkit untuk mencapai bidang pembangunan lainnya dalam rangka ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi.

Sasaran staregik pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dengan Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim ; Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi

rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species ; dan Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitasnya

Indikator sasaran strategis yang ingin dicapai adalah : Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5 - 68,5 dan memastikan penurunan emisi GRK sebesar 26% dari BAU ; Kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2014 ; dan Peningkatan derajat keberfungsian ekosistem.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Lingkungan Hidup Tahun 2019

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021 ditetapkan tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup adalah : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan melalui pembangunan berkelanjutan. Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan sumber daya alam.
3. Meningkatnya kualitas informasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2016 – 2021 secara lengkap tersaji pada tabel 3.1.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan Tahun 2019 masih melaksanakan dan melanjutkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN (TAHUN AKHIR RENTSRA)	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	IKLH	75,98%	Menurunkan tingkat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Ambang baku mutu	Rumus IKLH (IKU, IKA & IKTL)	75,59	73,80	70,75	70,75	68,75	68,75
				Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Sumber Daya Alam	(1) Luasan Taman KEHATI	Berdasarkan Permen LH No 29 th 2009 ttg Pedoman Konservasi Keanekaragaman hayati di Daerah Permen LH No 3 th 2012 ttg Taman Keanekaragaman hayati = minimal 10 hektar	2	4	6	8	10	10
					(2) Lokasi RTH	Luas RTH = 20% x luas ibu kota Kecamatan minimal 1 lokasi per kecamatan	3	5	7	12	15	17
					(2) Kasus yg ditindak lanjuti	Jumlah kasus yg ditindaklanjuti jumlah pengaduan yg dilaporkan/masuk	7	7	7	7	7	7

				Meningkatnya Kualitas Informasi dan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	(1) Persentase informasi lingkungan yg valid	Jumlah dokumen sesuai NSPK Jumlah dokumen lingkungan	60%	75%	80%	85%	95%	100%
					(2) Jumlah perorangan / kelompok masyarakat / badan usaha peduli lingkungan	$\frac{n - (n-1)}{(n-1)} \times 100 \%$ Keterangan : n = realisasi tahun berjalan (n - 1) = realisasi tahun lalu	35%	40%	50%	65%	70%	75%

Sumber : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada tahun 2017 , misalnya : Pencapaian visi dan misi kepala daerah ; Pencapaian MDGs ; Pengentasan kemiskinan ; Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup ; Pendayagunaan potensi ekonomi daerah ; Pengembangan daerah terisolir ; Permendagri Nomor 13 tahun 2006 ; dan Petunjuk Teknis DAK dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan dan telah ditetapkan pada Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

I. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. Pemantauan Kualitas Media Skala kabupaten
2. Pemantauan Kualitas Udara Emisi
3. Kajian penetapan pengendalian kerusakan tanah pada sumber dampak (degradasi lahan)
4. Identifikasi sumber pencemar lingkungan berdasarkan sumber pencemar lingkungan
5. Inventarisasi data pemantauan kualitas lingkungan utk menetapkan baku mutu dan status mutu lingkungan
6. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
7. Peningkatan sarana pendukung pengawasan lingkungan
8. Peningkatan kompetensi tenaga teknis laboratorium
9. Pengujian Air Sungai Se - Kabupaten Pesisir Selatan
10. Operasional Laboratorium
11. Peningkatan akreditasi laboratorium oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional)
12. Pemantauan Kualitas Lingkungan
13. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
14. Koordinasi Gerakan Sumatera Barat Bersih 2019
15. Penyusunan Laporan Periodik Sampah
16. Pengelolaan Bank Sampah
17. Sosialisasi dan pembinaan pengelolaan dan manajerial bank sampah 3R terhadap masyarakat
18. Pelatihan Keterampilan pengelolaan sampah 3R

19. Operasional Mekanisme Pemasaran produk 3R
20. Pengkajian Penetapan Status Mutu Lingkungan dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
21. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
22. Pembangunan Pengelolaan Limbah Cair Pemukiman Masyarakat Perkotaan (Ipal Komunal)
23. Pembangunan septik Tank dan MCK Komunal masyarakat pesisir pantai
24. Pembangunan septik Tank Komunal dan MCK Komunal masyarakat di Bantaran Sungai
25. Pelaksanaan Program Penilaian Kinerja Usaha Tingkat Daerah (PROPERDA)
26. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Mengenai Baku Mutu Lingkungan
27. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pembuangan sampah
28. Sosialisasi produk hukum tentang pembuangan sampah

II. Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan

29. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan
30. Sosialisasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Media Lingkungan
31. Sosialisasi Dokumen PPLH terhadap pemilik usaha/kegiatan
32. Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Pelestarian Lingkungan (Kalpataru)
33. Pembinaan dan Pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (PROIKLIM)
34. Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)
35. Penyusunan Data Base Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan
36. Peningkatan Akurasi dan Evaluasi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
37. Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Lingkungan Hidup
38. Pembahasan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL
39. Pembinaan, Pelaksanaan dan Implementasi AMDAL dan UKL-UPL
40. Penyusunan Laporan RKL-RPL
41. Pembuatan Web Site Informasi Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan
42. Penguatan Komisi AMDAL yang berlisensi

- 43. Inventarisasi Kegiatan/Usaha yg Belum Memiliki Dokumen Lingkungan
- 44. Inventarisasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan terhadap Pelaku Usaha UMKM
- 45. Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Lingkungan Hidup
- 46. Sosialisasi terhadap pemilik kegiatan tentang kewajiban penyusunan laporan semester 1 x 6 bulan
- 47. Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan
- 48. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup
- 49. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

III. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- 50. Inventarisasi data dan informasi KEHATI kab. Pesisir Selatan
- 51. Pembebasan Lahan Taman Kehati dan Ekowisata
- 52. Disain Pembangunan Taman KEHATI Kab. Pesisir Selatan
- 53. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Kab. Pesisir Selatan
- 54. Pemeliharaan Taman Kehati
- 55. Pembangunan Bank Bibit Tanaman
- 56. Penetapan Ikon Flora/Fauna Kab. Pesisir Selatan
- 57. Inventarisasi Lahan Akses Terbuka Kab. Pesisir Selatan
- 58. Pengelolaan Lahan Akses Terbuka
- 59. Inventarisasi Data Pelestarian Kawasan Pesisir Laut
- 60. Pembebasan Lahan RTH
- 61. Pembangunan RTH
- 62. Pemeliharaan RTH

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 63. Pelatihan pejabat fungsional PPLHD

V. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 64. Peningkatan Peralatan Kerja Lapangan
- 65. Peningkatan Peralatan Survey
- 66. Pembangunan Pos Pengaduan Masalah Lingkungan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dengan total jumlah usulan program/kegiatan sebesar Rp.8.473.500.000,- terdiri dari 5 Program dan 66 Kegiatan, dengan perkiraan maju 2019 adalah sebesar Rp.8.493.000.000,-. Dengan rincian pada BAB IV.

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019 ini dibuat semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan adalah bahwa seringkali rencana kerja yang telah diajukan tidak seluruhnya terpenuhi anggarannya sehingga hanya 48,06 % yang dapat terealisasi dalam bentuk kegiatan dan program.

Sedangkan bila ditinjau dari segi anggaran tidak semua rencana dapat terealisasi dengan anggaran yang telah diusulkan, namun demikian kegiatan tetap harus berjalan dengan hasil yang optimal.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 13 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 32 tahun 2001 tentang Pemerintahan Desa, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 10 tahun 2013 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rencana Tindak lanjut dari semua pemegang kebijakan ini adalah untuk mempercepat pembangunan yang memperhatikan lingkungan dan pembangunan berwawasan lingkungan di segala bidang.

Akhirnya itulah yang dapat kami sampaikan, semoga rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup ini ada manfaatnya.

Painan, 30 Maret 2018

Mengetahui :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan

(**Ir. Hj. Nelly Armidha, MM**)

NIP. 19581212 198911 2 001

CS Scanned With CamScanner

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp). 000	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp). 000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			70.75	8,324,000			68.75	6,855,500	
1	Pemantauan Kualitas Media Skala kabupaten	Kualitas Media skala kabupaten	15 Kecamatan	sungai dan embung	347,500	APBD		sungai, embung dan air laut	417,000	
2	Identifikasi sumber pencemar lingkungan berdasarkan sumber pencemar lingkungan	identifikasi sumber pencemaran	15 Kecamatan	15 Kecamatan	150,000	APBD		15 Kecamatan	150,000	
3	Inventarisasi data pemantauan kualitas lingkungan utk menetapkan baku mutu dan status mutu lingkungan	Inventarisasi data	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100,000	APBD		15 Kecamatan	100,000	
4	Pengujian Air Sungai Se - Kabupaten Pesisir Selatan	air sungai Se-Kabupaten Pesisir Selatan	15 Kecamatan	18 Sungai	216,000	APBD		18 Sungai	216,000	
5	Operasional Laboraturium	Kelancaran Opersional Labor	Kab.Pessel	Kelancaran Opersional Labor	1,000,000	APBD	telah dibentuk UPT Labor	Kelancaran Operasional Labor	1,100,000	
6	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kualitas Lingkungan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	150,000	APBD		15 Kecamatan	150,000	
7	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Kota Bersih,teduh dan Hijau	Kota Painan	3 lokasi	300,000	APBD		3 lokasi	330,000	
8	Koordinasi Gerakan Sumatera Barat Bersih	Kecamatan Bersih, Teduh dan hijau	15 Kecamatan	Kecamatan bersih dan hijau	80,000	APBD		Kecamatan bersih dan hijau	80,000	
9	Pembinaan dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Pembinaan terhadap Kegiatan Penghasil Limbah B3	Kab.Pessel	15 Kec	100,000	APBD		15 Kec	100,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Pelestarian Lingkungan (Kalpataru)	Pemerhati Lingkungan	15 Kecamatan	2 kegiatan	100,000	APBD		2 kegiatan	110,000	
11	Pembinaan dan Pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (PROIKLIM)	Kampung Iklim	15 Kecamatan	2 kegiatan	100,000	APBD		2 kegiatan	110,000	
12	Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)	Sekolah adiwiyata	15 Kecamatan	5 Sekolah	225,000	APBD		5 Sekolah	247,500	
13	Peningkatan Akurasi dan Evaluasi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (SLHD/DIKPLH)	Tingkat Akurasi dan Evaluasi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Kab. Pessel		150,000	APBD			165,000	
14	Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Lingkungan Hidup (SPM-LH)	SMP LH	Kab. Pessel		50,000	APBD			50,000	
II	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan									
15	Penyusunan Laporan Periodik Sampah	Volume Sampah	Kab.Pessel	volume sampah	75,000	APBD		volume sampah	82,500	
16	Pengelolaan Bank Sampah	Kelola Bank Sampah	15 Kecamatan	15 Kecamatan	80,000	APBD		15 Kecamatan	80,000	
17	Pengadaan Bank Sampah	Adanya Bank Sampah	Koto XI Tarusan	1 unit	80,000	APBD/APBN	Dinaikkan Kembali Pada Usulan Forum OPD pada Tanggal 27 Februari 2018	Adanya Bank Sampah	88,000	
			Bayang	1 unit	80,000				88,000	
			IV Nagari Bayang Utara	1 unit	80,000				88,000	
			IV Jurai	1 unit	80,000				88,000	
			Batang kapas	1 unit	80,000				88,000	
			Sutera	1 unit	80,000				88,000	
			Lengayang	1 unit	80,000				88,000	
			Ranah Pesisir	1 unit	80,000				88,000	
			Linggo Sari Baganti	1 unit	80,000				88,000	
			Airpura	1 unit	80,000				88,000	
			Pancung Soal	1 unit	80,000				88,000	
			Basa Ampek Balai Tapan	1 unit	80,000				88,000	
			Ranah Ampek Hulu Tapan	1 unit	80,000				88,000	
			Lunang	1 unit	80,000				88,000	
			Silaut	1 unit	80,000				88,000	
18	Pengadaan Motor Sampah	Adanya Motor Sampah	Koto XI Tarusan	1 unit	52,500	APBD/APBN		Adanya Motor Sampah	52,500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bayang	1 unit	52,500		Dinaikkan Kembali Pada Usulan Forum OPD pada Tanggal 27 Februari 2018		52,500	
			IV Nagari Bayang Utara	1 unit	52,500				52,500	
			IV Jurai	1 unit	52,500				52,500	
			Batang kapas	1 unit	52,500				52,500	
			Sutera	1 unit	52,500				52,500	
			Lengayang	1 unit	52,500				52,500	
			Ranah Pesisir	1 unit	52,500				52,500	
			Linggo Sari Baganti	1 unit	52,500				52,500	
			Airpura	1 unit	52,500				52,500	
			Pancung Soal	1 unit	52,500				52,500	
			Basa Ampek Balai Tapan	1 unit	52,500				52,500	
			Ranah Ampek Hulu Tapan	1 unit	52,500				52,500	
			Lunang	1 unit	52,500				52,500	
			Silaut	1 unit	52,500				52,500	
19	Pembangunan Gedung 3R	Adanya Gedung 3R	Bayang	1 unit	200,000		Dinaikkan Kembali Pada Usulan Forum OPD pada Tanggal 27 Februari 2018	Adanya Gedung 3R	200,000	
			Lengayang	1 unit	200,000	APBD/APBN			200,000	
			Basa Ampek Balai Tapan	1 unit	200,000				200,000	
20	Pengadaan TPS	Adanya TPS	Koto XI Tarusan	1 unit	50,000	APBD/APBN	Dinaikkan Kembali Pada Usulan Forum OPD pada Tanggal 27 Februari 2018	Adanya TPS	50,000	
			Bayang	1 unit	50,000				50,000	
			IV Nagari Bayang Utara	1 unit	50,000				50,000	
			IV Jurai	4 unit	200,000				200,000	
			Batang kapas	1 unit	50,000				50,000	
			Sutera	1 unit	50,000				50,000	
			Lengayang	1 unit	50,000				50,000	
21	Pengadaan Tong Sampah		IV Jurai	100 Unit	3,000		Usulan Forum OPD pada Tanggal 27 Februari 2018			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Pengadaan Mobil Operasional Labor	Tersedianya kendaraan operasional pelayanan laboratorium lingkungan hidup	Kab.Pessel	1 Unit	750,000		Sarana Penunjang UPT Labor LH			
23	Pengadaan Peralatan Laboraturium	tersedianya peralatan laboratorium lingkungan hidup	Kab.Pessel	1 paket	1,000,000					
24	Sosialisasi dan pembinaan pengelolaan dan manajerial bank sampah 3R terhadap masyarakat	1 kali sosialisasi dan pembinaan	Kab.Pessel	80 ORG	60,000	APBD		80 ORG	60,000	
25	Peningkatan kompetensi tenaga teknis laboraturium	Kompetensi Tenaga teknis labor	Kab. Pessel	Kompetensi Tenaga teknis labor	100,000	APBD		Kompetensi Tenaga teknis labor	100,000	
26	Pembuatan Plank Himbauan Kebersihan	Plank Himbauan Kebersihan	Kab. Pessel		100,000					
II	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				2,150,000				830,000	
27	Kajian Lingkungan Hidup Startegis	Terlaksananya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis masing-masing Kebijakan Rencana Program OPD	15 Kecamatan	Kab.Pessel	250,000	APBD	Dianggarkan jika ada KRP yg wajib menyusun KLHS	15 Kec	275,000	
28	Inventarisasi data dan informasi KEHATI kab. Pesisir Selatan	luasan taman KEHATI	Kab. Pessel	10 Ha	400,000	APBD		10 Ha	500,000	
29	Inventarisasi Lahan Akses Terbuka Kab. Pesisir Selatan Berbasis GIS	Inventarisasi Lahan Akses Terbuka	Kab. Pessel	15 Kecamatan	300,000	APBD		15 Kecamatan	330,000	
30	Disain Pembangunan Taman KEHATI Kab. Pesisir Selatan	Desain Taman KEHATI	Kab. Pessel	1 Kab/Kota	300,000	APBN		Disain Taman Kehati	140,000	
31	Pembangunan Taman KEHATI	Taman KEHATI	Kec.Lunang	2 Ha	450,000		Usulan Forum OPD pada Tanggal 27 Februari 2018			
32	Pembangunan RTH	lokasi dan luasan ruang terbuka hijau	Kec.Basa Ampek Balai Tapan	3 ikk	150,000	APBN	Usulan Forum OPD pada Tanggal 27 Februari 2018	15	375,000	
			Kec.Bayang		150,000	APBN	Usulan Musrenbang 2017 Belum tertampung dalam APBD 2018 diusulkan kembali pada Tahun 2019 dan 2020			
			Kec.Batang Kapas		150,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan				1,075,000				772,500	
33	Penyusunan Data Base Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan	data Base LH	Kab. Pessel	1 data base	50,000	APBD		1 data base	50,000	
34	Pembahasan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL	Dokumen AMDAL dan UKL-UPL	Kab. Pessel	Dokumen AMDAL yg diajukan oleh pemrakarsa kegiatan/usaha	200,000	APBD		Dokumen AMDAL yg diajukan oleh pemrakarsa kegiatan/usaha	220,000	
35	Pembinaan, Pelaksanaan dan Implementasi AMDAL dan UKL-UPL	Ketaatan Pemrakarsa dalam menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL 1 x 6 Bulan	Kab. Pessel	dokumen yg telah disusun dan disahkan	100,000	APBD		dokumen yg telah disusun dan disahkan		
36	Sosialisasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Media Lingkungan	Sosialisasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Media Lingkungan	Kab.Pessel	15 Kecamatan	50,000	APBD		15 Kecamatan	50,000	
37	Sosialisasi Dokumen PPLH terhadap pemilik usaha/kegiatan	Sosialisasi Dokumen RPPLH terhadap Pembangunan Daerah Kab.Pessel	Kab.Pessel	15 Kecamatan	100,000	APBD		15 Kecamatan		
38	Inventarisasi Kegiatan/Usaha yg Belum Memiliki Dokumen Lingkungan	Terlaksananya Inventarisasi Kegiatan/Usaha yg Belum Memiliki Dokumen Lingkungan	Kab.Pessel	15 Kecamatan	50,000	APBD		15 Kecamatan	50,000	
39	Penguatan Komisi AMDAL yang berlisensi	Komisi Amdal Lisensi	Kab.Pessel	Komisi AMDAL yang Berlisensi	100,000	APBD		Komisi AMDAL yang Berlisensi	100,000	
40	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	Terlaksana sosialisasi Peraturan dan Perundang undangan	Kab.Pessel	15 Kecamatan	75,000	APBD		15 Kecamatan	82,500	
41	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	Pengaduan masyarakat	Kab.Pessel	8 kasus	200,000	APBD		8 kasus	220,000	
42	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah		Kab.Pessel		150,000	APBD				
IV	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				462,500				508,750	
43	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening air, telepon dan listrik	Kab.Pessel		24,000	APBD			26,400	
44	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Horarium ASN dan Non ASN	Kab.Pessel		59,500	APBD			65,450	
45	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Honorarium tenaga kebersihan & penyediaan bahan pembersih	Kab.Pessel		68,000	APBD			74,800	
46	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	Kab.Pessel		5,000	APBD			5,500	

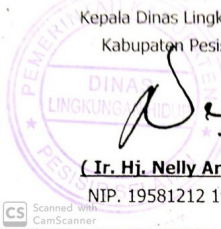
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Kab.Pessel		24,000	APBD			26,400	
48	Penyediann Barang cetakan dan Penggadaan	Barang cetakan dan penggadaan	Kab.Pessel		24,000	APBD			26,400	
49	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kab.Pessel		6,500	APBD			7,150	
50	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kab.Pessel		10,500	APBD			11,550	
51	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan Minum Kantor	Kab.Pessel		18,000	APBD			19,800	
52	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	Kab.Pessel		150,000	APBD			165,000	
53	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab.Pessel		35,000	APBD			38,500	
54	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan SKPD	APBD Perubahan, RAPBD 2019	Kab.Pessel		38,000	APBD			41,800	
V	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				462,000				448,200	
55	Pengadaan Kendaraan Dinas	Sepeda Motor 4 unit	Kab.Pessel		80,000	APBD			88,000	
56	Pengadaan dan Perlengkapan Gedung Kantor	AC = 2 unit, Laptop = 2 unit, drone = 1 unit	Kab.Pessel		100,000	APBD			50,000	
57	Pengadaan Mobileur	Meja 15 unit, kursi 15 unit, lemari 3 unit	Kab.Pessel		150,000	APBD			165,000	
58	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Mobil Dinas = 2 unit, Roda 2 = 4 unit, operasional kendaraan dinas = 1 paket	Kab.Pessel		72,000	APBD			79,200	
59	Peningkatan Peralatan Kerja Lapangan	Peralatan Survey	Kab.Pessel	Peralatan Survei Lapangan	60,000	APBD		Peralatan Survey	66,000	
VI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				185,000				203,500	
60	Pelatihan dan Pendidikan Formal	PNS & Non PNS	Kab.Pessel		35,000	APBD			38,500	
61	Pelatihan pejabat fungsional PPLHD, AMDAL A & AMDAL C	Pejabat Fungsional PPLHD	Kab.Pessel	4 orang	150,000	APBD		4 orang	165,000	
VII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				65,000				65,000	
62	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan Lakip,LKPJ, Tapkin dan LPPD dan Laporan lainnya	Kab.Pessel		20,000	APBD			22,000	
63	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		15 Kec		45,000	APBD			45,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JUMLAH				12,723,500				9,683,450	

Painan, 30 Maret 2018
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



(Ir. Hj. Nelly Armidha, MM)
NIP. 19581212 198911 2 001



CS Scanned with CamScanner